

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meskipun dikenal sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia Timur, Korea Selatan terus dihantui oleh potensi konflik dengan Korea Utara yang berakar dari Perang Korea. Perpecahan di semenanjung Korea pada dasarnya merupakan dampak dari "Proxy War", yaitu benturan ideologi antara Amerika Serikat (liberal-kapitalis) dan Uni Soviet (sosialis-komunis) pasca Perang Dingin.¹ Sekitar pada tahun 1984, tahun dimana permulaan bagi Korea Utara dalam melakukan pengembangan serta uji coba peluncuran rudal balistiknya yang mampu menempuh jarak 300 km. Korea Utara menguji rudal balistik jarak pendek yang dikenal dengan nama "Scud-B", yang merupakan versi modifikasi dari rudal Scud-B buatan Soviet. Fokus pengembangan militer Korea Utara terus diarahkan pada penyempurnaan sistem rudal dan teknologi nuklir. Dalam tahap ini, mereka memulai proyek rudal 'Hwasong-6' yang mampu menempuh jarak 500 km. Kemajuan ini menunjukkan laju perkembangan kekuatan militer Korea Utara yang tergolong cepat dan luar biasa, terutama dalam ranah persenjataan nuklir.²

¹ KoreaInstitute. (2012). *Korea Institute For National Unification White Paper on Human Right in North Korea*. Korea Institute for National Unification.

² Cho, S.R. (2020). A study on North Korea nuclear missile threat and the ROK's response strategy. *Military Discourse*, 100, 7-74.

Periodesasi ketegangan akibat adanya uji coba nuklir Korea Utara mulai meningkat di abad ke-21.³ Korea Utara melakukan uji coba nuklir pertama dan kedua di tahun 2006 dan 2009 yang memicu ancaman dan sanksi internasional. Korea Selatan menanggapi ancaman tersebut dengan melakukan penangguhan hubungan perdagangan dan melanjutkan siaran propaganda di sepanjang perbatasan Zona Demilitarisasi Korea (DMZ), serta meningkatkan kesiapan militernya.⁴ Tepatnya pada 25 Februari 2013, dilantiknya presiden Park Geun Hye ternyata menimbulkan ancaman bagi Korea Utara, Korea Utara meresponnya dengan melakukan uji coba nuklir ketiganya pada 12 Februari 2013, uji coba tersebut terjadi hanya dua minggu sebelum pelantikan Presiden Park Geun Hye, hal itu dilakukan Korea Utara karena merasa terancam atas *statement* dari Presiden Park Geun Hye yang memandang persenjataan nuklir Korea Utara sebagai ancaman eksistensial bagi negaranya.⁵ Korea Selatan merespon dengan menginisiasi strategi *Three Axis Defense System*.⁶ Kemudian, Korea Utara melakukan uji coba nuklir keempat dan kelima nya di tahun 2016 dan di tahun 2017 pula, Korea Utara berhasil melakukan uji coba bom hidrogen. Ancaman keempat dan kelima tersebut direspon oleh Korea

³ Anisa, S. 2017. Sejarah Asia Timur: Dari masa pradaban kuno hingga modern. Yogyakarta : Penerbit Socuality.

⁴ Oberdorfer, D. (2001). *The Two Koreas: A Contemporary History*. Basic Books.

⁵ Lee, S. J., & Moon, C. I. (2013). *North Korea's nuclear policy and the changing inter-Korean relations*. *Journal of Asian and African Studies*, 48(4), 411-429. <https://doi.org/10.1177/0021909613491346>

⁶ Kim, T. (2018). South Korea's Three-Axis System: Capabilities and Challenges. *Asian Security*, 14(2), 123-145. doi:10.1080/14799855.2018.1447349

Selatan dengan mengerahkan sistem pertahanan rudal THAAD, meskipun mendapat penolakan keras dan mendapat sanksi ekonomi dari Tiongkok.⁷

Korea Utara kembali proaktif melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) pada Maret 2022. Sepanjang tahun 2022, Korea Utara melakukan lebih dari 70 peluncuran rudal balistik di jumlah tertinggi dalam sejarahnya⁸, termasuk ICBM dan rudal jarak pendek yang berpotensi membawa hulu ledak nuklir yang secara khusus meningkatkan ancaman terhadap keamanan regional.⁹ Satu uji coba yang dilakukan pada tahun 2022 adalah pada hari Sabtu, 7 Mei 2022, Pyongyang menembakkan rudal balistik dari kapal selam.¹⁰ Peluncuran tersebut dilakukan hanya beberapa hari sebelum Presiden terpilih Korea Selatan yaitu Yoon Suk Yeol, yang telah berjanji untuk mengambil tindakan keras terhadap Korea Utara, yang akan dilantik pada hari Selasa, 10 Mei 2022.¹¹

Dalam Buku Putih Pertahanan Nasional Korea Selatan tahun 2022, disebutkan bahwa pemerintah Korea Selatan di era presiden Yoon Suk Yeol secara tegas membuktikan bahwa pemerintah Korea Selatan menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorialnya terutama mencapai perdamaian kedua negara Korea

⁷ Moon, C. I., & Armstrong, C. K. (2019). *Korean Peninsula: Peace and security issues*. In C. W. Hughes & M. Calvin (Eds.), *Routledge handbook of Asian security studies* (pp. 193-207). London, UK: Routledge.

⁸ Min, H (2023). *Analysis on the Military Parade Commemorating the 70th Anniversary of the Armistice.*, repo.kinu.or.kr, <https://repo.kinu.or.kr/bitstream/2015.oak/14501/1/CO23-18%28e%29.pdf>

⁹ "The CNS North Korea Missile Test Database," *The Nuclear Threat Initiative* (blog), April 28, 2023, <https://www.nti.org/analysis/articles/cns-north-korea-missile-test-database/>.

¹⁰ Rozman, G, Terry, SM, & Jo, EA (2023). *South Korea's Wild Ride: The Big Shifts in Foreign Policy from 2013 to 2022.*, books.google.com, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=a_KEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1969&dq=south+korean+yoon+boards+us+submarine+after+pyongyang+fired+ballistic+missiles&ots=Kc2AmKJ5Uj&sig=sSaoibvMFz60Q18-FKa8EEEEfkCg

¹¹ Fiori, A, & Milani, M (2023). Korean peninsula 2022: stuck between new leadership and old practices. *ASIA MAIOR*, cris.unibo.it, <https://cris.unibo.it/handle/11585/925015>

melalui revitalisasi *Three Axis Defense System*.¹² Sehingga, menjadi menarik untuk diteliti karena apa alasan, motivasi, dan tujuan Korea Selatan dalam merevitalisasi *Three Axis Defense System* dalam mencegah terjadinya potensi konflik di Semenanjung Korea dan regional. Serta menarik bagi penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai alasan Korea Selatan merespon secara defensif dalam mengatasi ancaman uji coba nuklir Korea Utara melalui revitalisasi strategi “Three Axis Defense System”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, tulisan ini berupaya untuk menganalisa respon Korea Selatan pada masa pemerintahan Yoon Suk Yeol bersifat realis defensif dalam merespon ancaman uji coba nuklir Korea Utara. Dengan demikian, pertanyaan penelitian dari tulisan ini adalah **mengapa Korea Selatan merespon ancaman uji coba nuklir Korea Utara di tahun 2022 melalui revitalisasi *Three Axis Defense System*?**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis alasan Korea Selatan dalam mengambil keputusan untuk memperbarui kebijakan *Three Axis Defense System*.

¹² Ministry of National Defense of the Republic of Korea. (2022). *Defense White Paper 2022*.

2. Untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan luar negeri pertahanan dan keamanan Korea Selatan yang bersifat realis defensif terhadap Korea Utara.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan untuk perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam kajian disiplin ilmu hubungan internasional mengenai alasan Korea Selatan pada masa pemerintahan Yoon Suk Yeol bersikap realis defensif terhadap Korea Utara, yaitu yang berkenaan dengan respon Korea Selatan dalam mencegah aksi provokatif dari Korea Utara. Serta bermanfaat bagi akademisi hubungan internasional serta pemerhati konflik internasional yang ingin mengkaji tentang konflik di Semenanjung Korea untuk studi kasus yang lain.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan terutama para mahasiswa Hubungan Internasional. Dengan adanya penelitian ini, peneliti serta para mahasiswa Hubungan Internasional diharapkan dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh wawasan tentang sikap realis defensif Korea Selatan terhadap ancaman Korea Utara. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca pada umumnya mengenai dampak dari ancaman Uji Coba Nuklir Korea Utara terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan Korea Selatan.

1.4 Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu dalam penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan judul peneliti. Lantas, peneliti merangkum beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul ini, kemudian beberapa penelitian terdahulu ini sudah di tinjau untuk dijadikan bahan atau dasar dalam penelitian lanjutan untuk penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah dari penelitian **Mustikasari** yang berjudul **Analisa Respon Korea Selatan Terhadap Pemboman Pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara**¹³. Penulisan ini membahas tentang bagaimana respon Korea Selatan dalam menanggapi perilaku Korea Utara dalam pemboman pulau Yeonpyeong. Pilihan strategis Korea Selatan tersebut bersifat terukur, namun berhasil menciptakan mekanisme penangkalan (*deterrence*) guna membendung perilaku provokatif Korea Utara. Penelitian oleh Mustikasari memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Persamaan tersebut terletak pada penyebab konflik yang sama, yakni perilaku provokatif Korea Utara, yang kemudian memicu respons balasan dari Korea Selatan. Kemudian, perbedaan penelitiannya terlihat pada pemicu adanya konflik, yang jika dalam penelitian Mustikasari munculnya konflik yang berawal dari pemboman Pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara, dan dalam penelitian yang sedang diteliti ini pemicu dari konfliknya adalah uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan.

¹³ Mustikasari, Analisa Respon Korea Selatan Terhadap Pemboman Pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara, Skripsi, 2013, Universitas Muhammadiyah Malang

Penelitian terdahulu yang kedua adalah berbentuk jurnal dari **Leofarhan dan Andrea Abdul Rahman Azzqy** yang berjudul **Kerjasama Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam Penempatan THAAD Sebagai Respon atas Uji Coba Misil Balistik Korea Utara Periode 2013-2017**.¹⁴ Penelitian terdahulu ini menganalisis kerja sama keamanan Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam memetakan sistem THAAD tahun 2013 - 2017 sebagai jawaban atas uji coba rudal balistik Korea Utara. Studi ini berargumen bahwa pengerahan THAAD bertujuan memperlihatkan kekuatan dan kemampuan Seoul dalam menyeimbangkan (*balance*) serta mengamankan kawasan dari ancaman tersebut. Di sisi lain, THAAD juga dipandang sebagai solusi sementara bagi Korea Selatan, mengingat sistem pertahanan rudal balistik (*Ballistic Missile Defense*) domestiknya masih dalam tahap pengembangan. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *Balance of Power* untuk menganalisis respons Korea Selatan. Sedangkan perbedaannya terlihat dari bagaimana penelitian terdahulu ini membahas spesifik tentang kerjasama Korea Selatan dengan Amerika Serikat dalam menghadapi ancaman Korea Utara, dan selain itu terdapat perbedaan dari tahun penelitian.

Penelitian terdahulu selanjutnya yang ketiga yaitu skripsi oleh **Amelia Fitriani** yang berjudul **Penerapan The Policy of Peace and Prosperity Korea**

¹⁴ Leofarhan, L, & Azzqy, AAR (2018). Kerja Sama Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam Penempatan THAAD Sebagai Respon Atas Uji Coba Misil Balistik Korea Utara Pada Periode 2013 *Balcony*, jom.fisip.budiluhur.ac.id, <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/index.php/balcony/article/view/45>

Selatan terhadap Korea Utara di Bawah Pemerintahan Roh Moo Hyun.¹⁵

Penelitian ini mengkaji penerapan *The Policy of Peace and Prosperity* di era Presiden Roh Moo-hyun, yang menolak senjata nuklir Korea Utara dan mengedepankan resolusi damai serta peran aktif Seoul. Namun, upaya diplomasi ini terhambat oleh kebijakan unilateral dan klaim keras administrasi George W. Bush di AS, yang justru memicu ketegangan di Semenanjung Korea. Perbedaan penelitian dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti sekarang ini adalah tentang respon Presiden Korea Selatan yaitu Roh Moo-Hyun yang mencoba untuk berupaya membuat kebijakan reunifikasi Korea namun dalam aspek diplomasi ekonomi dan pendekatan yang tidak realistis, berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti tulis ini lebih cenderung pendekatan secara realisme, atau menggunakan pendekatan *hard diplomacy* sebagai pendekatan terhadap Korea Utara. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang kebijakan luar negeri Korea Selatan spesifik pada masa pemerintahan presiden Korea Selatan yang pernah menjabat.

Penelitian terdahulu yang keempat dari **Haikal Hasan Thalib** yang berjudul **Kebijakan Pertahanan Keamanan Korea Selatan dalam Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara antara tahun 2002-2012.**¹⁶ Penelitian ini

¹⁵ Fitria, Amelia. "Penerapan The Policy of Peace and Prosperity Korea Selatan terhadap Korea Utara pada Masa Pemerintahan Roh Moo-hyun", Skripsi, Jakarta: jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah jakarta, diakses dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24012>, (10/04/2023, 11.20 WIB)

¹⁶ THALIB, Haikal Hasan. KEBIJAKAN PERTAHANAN KEAMANAN KOREA SELATAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN NUKLIR KOREA UTARA ANTARA TAHUN 2002-2012. **DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)**, [S.l.], v. 1, n. 03, apr. 2015. ISSN 2828-1853. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/12995>>. Date accessed: 07 May 2023.

mengkaji respons kebijakan Korea Selatan terhadap perkembangan nuklir Korea Utara dengan menganalisis perbedaan pendekatan di tiga era kepresidenan (Kim Dae-jung, Roh Moo-hyun, dan Lee Myung-bak) antara tahun 2002 hingga 2012. Studi terdahulu ini memiliki titik temu sekaligus perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada objek material, yakni respons Korea Selatan terhadap ancaman senjata nuklir Korea Utara. Perbedaannya terdapat pada fokus analisis: penelitian terdahulu bersifat kronologis dengan memetakan berbagai kebijakan dari tiga periode pemerintahan (2002-2012), sedangkan penelitian ini berfokus tematik pada analisis mendalam terhadap satu strategi defensif spesifik.

Penelitian kelima dari **Indryanti Pringgodigdo Joyo Negoro** dalam jurnalnya yang berjudul "**Kebijakan Penempatan Sistem Anti Rudal Amerika Serikat Di Korea Selatan**".¹⁷ Penelitian terdahulu ini menganalisis motivasi Amerika Serikat dalam menempatkan sistem THAAD di Korea Selatan. Argumen utamanya adalah kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh upaya AS untuk menjaga stabilitas keamanan regional Asia Timur dan memenuhi kewajiban aliansinya dalam melindungi keamanan nasional Korea Selatan. Secara metodologis, penelitian ini bersifat kualitatif-eksplanatif dengan menggunakan kerangka teori *Regional Security Complex*, realisme, dan kerja sama keamanan. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah fokus analisisnya yang melihat dari sudut pandang kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Sedangkan penulis

¹⁷ Negoro, IPJ KEBIJAKAN PENEMPATAN SISTEM ANTI RUDAL AMERIKA SERIKAT DI KOREA SELATAN. *Ilmu Hubungan Internasional*, [ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/journal%20indry%20pin%201402045017%20pdf%20(11-02-18-03-34-37).pdf), [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/journal%20indry%20pin%201402045017%20pdf%20\(11-02-18-03-34-37\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/11/journal%20indry%20pin%201402045017%20pdf%20(11-02-18-03-34-37).pdf)

berfokus pada respon dan strategi-strategi yang digunakan oleh Korea Selatan dengan beraliansi bersama dengan Amerika Serikat.

Penelitian keenam adalah dari **Isni Safirah Iraeni** yang berjudul **Pengaruh Uji Coba Nuklir Korea Utara Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur**.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh uji coba senjata nuklir Korea Utara terhadap stabilitas keamanan di Asia Timur dan menjelaskan respon negara negara di Asia Timur terhadap uji coba nuklir Korea Utara serta bagaimana nuklir Korea Utara mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Penelitian ini membahas tentang kecaman dari negara - negara Asia Timur yang mengecam aksi uji coba nuklir Korea Utara kemudian negara negara Asia Timur memunculkan respon yang realis yaitu memunculkan kepemilikan senjata nuklir oleh negara negara Asia Timur dan sehingga terciptanya perlombaan senjata di antara negara - negara dalam kawasan Asia Timur untuk meningkatkan kapabilitas keamanan negara. Perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti sekarang ini yaitu bagaimana negara – negara di Asia Timur merespon uji coba nuklir Korea Utara, sedangkan penelitian yang penulis tulis ini membahas tentang strategi defensif realisme dari Korsel sebagai negara utama yang terlibat konflik dengan Korea Utara. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang pengaruh yang diciptakan oleh negara dari uji coba yang dilakukan oleh Korea Utara.

¹⁸ TIMUR, SKDIKA, & IRAENI, IS PENGARUH UJI COBA NUKLIR KOREA UTARA TERHADAP. [digilib.unhas.ac.id,http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDIwMjg4OTA3Y2Y3NjBmZWU2YWZkNzM5MTZiY2YxODNiZjdiN2NmZg==.pdf](http://digilib.unhas.ac.id/http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDIwMjg4OTA3Y2Y3NjBmZWU2YWZkNzM5MTZiY2YxODNiZjdiN2NmZg==.pdf)

Penelitian ketujuh adalah skripsi dari **Sieco Mayory A.P** yang berjudul **Analisa Respon Defensif Korea Selatan terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara**.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang respon defensif yang dilakukan oleh Korea Selatan untuk menunjukkan identitas baru yang dimiliki oleh Korea Selatan. Yang mana diwujudkan dengan kebijakan - kebijakan yang bersifat defensif sebagai tindakannya sebagai dasar identitasnya, kemudian dengan kebijakannya tersebut terdapat kepentingan - kepentingan yang terdapat dalam tindakannya. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah Respon Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan pada masa pemerintahan Era Kim Dae Jung, Era Pemerintahan Roo Moo Hyun, dan Era Pemerintahan Lee Myung Bak yang mana ketiga presiden tersebut adalah presiden yang menjabat sebelum presiden Yoon Suk Yeol. Persamaan dari penelitian ini adalah memiliki ide pokok mengenai respon Korea Selatan terhadap ancaman nuklir Korea Utara yang bersifat realis defensif.

Penelitian kedelapan yaitu berbentuk jurnal yang berjudul **Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan di bawah Kepemimpinan Park Geun hye dan Moon Jae In terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara** yang disusun oleh **Baiq Ulfa Septi Lestari, Lalu Putrawandi Karjaya, dan Muhammad Sood**.²⁰ Penelitian ini membahas tentang perbedaan kebijakan luar negeri terhadap nuklir Korea Utara pada masa kepemimpinan Park Geun hye dan Moon Jae In. Terlihat pada pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dari

¹⁹ Paundra, S. M. A. (2019). *ANALISA POLA RESPON DEFENSIF KOREA SELATAN TERHADAP UJI COBA NUKLIR KOREA UTARA*.

²⁰ULFA SEPTI LESTARI, B. (2021). *Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dibawah Kepemimpinan Park Geun Hye dan Moon Jae In Terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara*. Indonesian Journal of Global Discourse, 3(1), 81–109. <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.32>

kedua presiden ini berbeda, di penelitian ini menyebutkan bahwa Park Geun Hye ini memiliki sikap idealis dan konservatif sehingga kebijakan luar negerinya condong kepada arah memperkuat status militer negara dan beliau juga ingin membuat kebijakan yang lebih tegas terhadap Korea Utara. Sedangkan presiden Moon Jae In cenderung membuka prospek perdamaian di antara dua Korea karena kebijakannya cenderung kooperatif dan lebih berhati - hati. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas tentang sifat atau sisi psikologis dari presiden Park Geun Hye dan Yoon Suk Yeol yang sama - sama memilih kebijakan yang lebih tegas terhadap ancaman - ancaman nuklir Korea Utara dan perbedaan yang terlihat dari kedua penelitian ini adalah bagaimana jurnal ini membandingkan kebijakan luar negeri presiden Korea Selatan di dua pemerintahan.

Penelitian kesembilan selanjutnya yaitu skripsi yang berjudul **Analisis Kebijakan Korea Selatan Terhadap Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Moon Jae In : Dukungan Terhadap Koeksistensi Damai Dua Korea** yang disusun oleh **Nadia Syafira** tahun **2021**.²¹ Penelitian ini membahas tentang bahwa arah kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara pada masa pemerintahan Moon Jae In yang cenderung lebih mendukung koeksistensi antara dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya yang mana dipengaruhi oleh pertimbangan Korea Selatan akan berbagai faktor yang berkaitan dengan konsekuensi yang memungkinkan harus dihadapi oleh Korea Selatan. Perbedaan penelitian tersebut

²¹ SYAFIRA, NS NADIA ANALISIS KEBIJAKAN KOREA SELATAN TERHADAP KOREA UTARA PADA MASA PEMERINTAHAN MOON JAE-IN: DUKUNGAN TERHADAP KOEKSISTESI Damai Dua Korea, 2021, [repo.jayabaya.ac.id,http://repo.jayabaya.ac.id/1335/1/Skripsi%20FISIP%20HI%20Nadia%20Syafira%20%282017350750035%29.pdf](http://repo.jayabaya.ac.id/http://repo.jayabaya.ac.id/1335/1/Skripsi%20FISIP%20HI%20Nadia%20Syafira%20%282017350750035%29.pdf)

dengan penelitian ini adalah kebijakan presiden Moon Jae In untuk prospek reunifikasi cenderung lebih kepada mendukung koeksistensi Korea Selatan dan Korea Utara, presiden Moon Jae In memilih kebijakan dengan berhati-hati terhadap proses reunifikasi dengan korea utara agar tidak menimbulkan konflik yang semakin panas antara korea selatan dan korea utara. Berbeda dengan penelitian ini yang penulis sedang teliti adalah presiden Yoon Suk Yeol yang lebih memilih untuk cara lebih *hard power* dibandingkan dengan kebijakan presiden Moon Jae In, dilihat dari bagaimana statement “Peace Through Strength” dari presiden Yoon Suk Yeol, dalam merespon ancaman uji coba nuklir Korea Utara. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah upaya Presiden Korea Selatan dalam proses perdamaian diantara kedua negara yaitu Korea Selatan dan Korea Utara.

Penelitian kesepuluh yaitu Jurnal berjudul **Dilema keamanan Korea Selatan dalam Menghadapi Nuklir Korea Utara**²² dari Atiqah tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang dilema keamanan Korea Selatan dalam menghadapi perkembangan nuklir Korea Utara kemudian tindakan yang diambil oleh Korea Selatan untuk menghadapi dilema keamanan tersebut. Upaya - upaya yang dilakukan Korea Selatan untuk menghadapi Korea Utara yang dibahas di dalam penelitian tersebut antara lain yaitu, pertama, tindakan Korea Selatan menambah kekuatan militer, kedua, Korea Selatan melakukan aliansi dengan Amerika Serikat dan Jepang, kemudian ketiga, Korea Selatan memperkuat

²² Atiqah, A (2017). DILEMA KEAMANAN KOREA SELATAN DALAM MENGHADAPI NUKLIR KOREA UTARA. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, *jdod.ejournal.unri.ac.id*, <https://jdod.ejournal.unri.ac.id/index.php/JDOD/article/download/7679/6682>

diplomasi dengan lembaga - lembaga internasional kemudian elemen terpenting dalam dilema keamanan Korea Selatan adalah mempertahankan diri dari serangan Korea Utara dan mengutamakan kepentingan nasionalnya menggunakan aspek militer. Perbedaan penelitian dari kedua penelitian ini adalah jurnal tersebut membahas mengenai dilema Korea Selatan dalam beraliansi dengan negara lain untuk memperkuat keamanannya, dan upaya serta respon Korea Selatan dalam menanggapi ancaman Korea Utara yang secara general atau garis besar, berbeda dengan penelitian yang sekarang peneliti tulis ini membahas tentang strategi dan upaya secara spesifik yang dilakukan oleh presiden Yoon Suk Yeol dalam menanggapi ancaman Uji Coba Nuklir Korea Utara.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Jenis dan Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mustikasari yang berjudul Analisa Respon Korea Selatan Terhadap Pemboman Pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara.	Eksplanatif, Pendekatan <i>Decision Making Process</i> (Model Aktor Rasional), <i>Deterrence</i>	Hasil dari penelitian ini adalah dalam merespon Korea Utara dengan strategi yang berskala kecil tetapi memiliki efek <i>deterrence</i> terhadap Korea Utara. Metode <i>Show Force</i> , sebagai keputusan <i>deterrence</i> untuk merespon ancaman Korea Utara. Keputusan metode <i>Show Force</i> ini adalah sebuah latihan militer yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat setelah serangan pulau Yeonpyeong oleh Korea Utara.
2	Leofarhan dan Andrea Abdul Rahman Azzqy yang	Konsep Model Aksi-Reaksi dan <i>Balance of</i>	Hasil dari penelitian ini adalah penyebaran THAAD oleh Amerika

	<p>berjudul Kerjasama Militer Korea Selatan dan Amerika Serikat dalam Penempatan Thaad Sebagai Respon atas Uji Coba Misil Balistik Korea Utara Periode 2013-2017.</p>	<p><i>Power</i>, metode kualitatif</p>	<p>Serikat di Semenanjung Korea untuk menunjukkan bahwa Korea Selatan memiliki kekuatan untuk mengimbangi dan melindungi kawasan dari uji coba rudal balistik Korea Utara. Pengerahan THAAD bertujuan memperlihatkan kekuatan dan kemampuan Seoul dalam menyeimbangkan (<i>balance</i>) serta mengamankan kawasan dari ancaman tersebut. Di sisi lain, THAAD juga dipandang sebagai solusi sementara bagi Korea Selatan, mengingat sistem pertahanan rudal balistik (<i>Ballistic Missile Defense</i>) domestiknya masih dalam tahap pengembangan.</p>
<p>3</p>	<p>Amelia Fitriani yang berjudul Penerapan The Policy of Peace and Prosperity Korea Selatan terhadap Korea Utara di bawah pemerintahan Roh Moo Hyun.</p>	<p>Metode analisis kuantitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri diplomasi dan teori bantuan luar negeri.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan kebijakan Roh Moo-hyun melalui instrumen kerjasama ekonomi seperti melalui KIC dan Gunung Kumgang adalah sebuah langkah yang tepat dan efektif. Presiden Roh Moo-hyun, yang menolak senjata nuklir Korea Utara dan mengedepankan resolusi damai serta peran aktif Seoul. Namun, upaya diplomasi ini terhambat oleh kebijakan unilateral dan klaim keras administrasi George W. Bush di AS, yang justru memicu ketegangan di Semenanjung Korea. Perbedaan penelitian dari penelitian terdahulu</p>

			dengan penelitian yang penulis teliti sekarang ini adalah tentang respon Presiden Korea Selatan yaitu Roh Moo-Hyun yang mencoba untuk berupaya membuat kebijakan reunifikasi Korea namun dalam aspek diplomasi ekonomi dan pendekatan yang tidak realis.
4	Haikal Hasan Thalib yang berjudul Kebijakan Pertahanan Keamanan Korea Selatan Menghadapi Ancaman Nuklir Korea Utara antara tahun 2002-2012	Metode penelitian deskriptif, dan menggunakan teori politik internasional yaitu <i>Security Dilemma</i>	Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan Korea Selatan dalam peningkatan keamanan dan persenjataan tentunya memiliki tujuan untuk melindungi serta untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara nya dari ancaman dan serangan nuklir Korea Utara. Kebijakan tersebut merupakan salah satu perwujudan dari pemikiran security dilemma yang mana upaya Korea Selatan dalam meningkatkan persenjataan dan keamanannya merupakan bukti ketakutan Korea Selatan terkait perkembangan nuklir Korea Utara.
5	Indryanti Pringgodigdo Joyo Negoro dalam jurnalnya yang berjudul "Kebijakan Penempatan Sistem Anti Rudal Amerika Serikat Di Korea Selatan"	Menggunakan metode kualitatif dengan jenis eksplanatif. menggunakan teori <i>regional security complex</i> , realisme dan konsep kerjasama keamanan.	Hasil dari penelitian ini adalah AS menempatkan sistem anti rudal THAAD di Korea Selatan didorong oleh dua faktor yaitu: Ketidakstabilan keamanan yang terjadi di Asia Timur dan sebagai program spionase oleh AS untuk mengeksplorasi atau melacak sistem informasi

			alutsista China dan Korut. Dan sebagai upaya diplomasi pertahanan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat.
6	Isni Safirah Iraeni yang berjudul Pengaruh Uji Coba Nuklir Korea Utara Terhadap Stabilitas Keamanan di Kawasan Asia Timur	Konsep kepentingan nasional, konsep <i>security dilemma</i> , dan konsep <i>regional security complex</i> .	Hasil dari penelitian ini adalah Kecaman dari negara - negara Asia Timur yang mengancam aksi uji coba nuklir Korea Utara kemudian negara negara Asia Timur memunculkan respon yang realis yaitu memunculkan kepemilikan senjata nuklir oleh negara negara Asia Timur dan sehingga terciptanya perlombaan senjata di antara negara - negara dalam kawasan Asia Timur untuk meningkatkan kapabilitas keamanan negara.
7	Sieco Mayory A.P yang berjudul Analisa Respon Defensif Korea Selatan terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara.	Menggunakan metode Eksplanatif, Teori Pendekatan Konstruktivisme Identitas, oleh Alexander Wendt	Hasil dari penelitian ini adalah suatu keputusan Korea Selatan yang bersikap defensif dalam merespon ancaman nuklir Korea Utara bertujuan untuk menjaga stabilitas di semenanjung Korea dalam menciptakan perdamaian. Konflik antar Korea disebabkan oleh perang dingin yang terjadi antara AS dan Uni Soviet. Korea Selatan dan Korea Utara menjadi korban dari masa perang dingin yang terjadi di masa lalu. Selama perang dingin terjadi di semenanjung Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara dapat di persepsikan bahwa kedua Korea tersebut saling

			bermusuhan. Dilihat dari bagaimana sikap kedua Korea tersebut saling meningkatkan kapabilitas militernya untuk menjatuhkan satu sama lainnya.
8	Penelitian dari Baiq Ulfa Septi Lestari, Lalu Putrawandi Karjaya, dan Muhammad Sood. Yang berjudul “ Analisis Perbedaan Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Dibawah Kepemimpinan Park Geun Hye dan Moon Jae In Terhadap Kepemilikan Senjata Nuklir Korea Utara ”	Menggunakan penelitian kualitatif dengan penambahan teori tentang pengambilan keputusan kebijakan luar negeri internal dan eksternal <i>setting</i> . Dari penelitian ini, ditemukan bahwa peneliti menggunakan teori kebijakan luar negeri yang mana fenomena yang ada terpengaruh oleh kebijakan luar negeri secara internal dan eksternal.	Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor seperti latar belakang, pengalaman hidup, lingkungan partai dan pertemanan, situasi domestik dan internasional, peran AS serta aksi reaksi antar dua Korea yang berbeda juga mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri antara Park Geun Hye dan Moon Jae In yang juga mempengaruhi prospek perdamaian diantara dua Korea. Dalam hal ini, Moon Jae In cenderung membuka prospek perdamaian diantara dua Korea karena kebijakannya yang cenderung kooperatif ditandai dengan berkurangnya intensitas konflik diantara dua Korea. Meskipun menempuh cara yang berbeda, kedua pemimpin ini memiliki tujuan yang sama yakni untuk mencapai kepentingan nasional Korea Selatan ditengah ancaman senjata nuklir Korea Utara.
9	Analisis Kebijakan Korea Selatan Terhadap Korea	Teori pilihan rasional atau Aktor rasional	Hasil dari penelitian ini adalah bagaimana pemerintahan Moon Jae

	<p>Utara Pada Masa Pemerintahan Moon Jae In : Dukungan Terhadap Koeksistensi Damai Dua Korea yang disusun oleh Nadia Syafira tahun 2021</p>	<p>Kemudian menggunakan metode penelitian yaitu penelitian deskriptif</p>	<p>In yang lebih mendukung koeksistensi damai di antara dua Korea daripada prospek reunifikasi keduanya, karena berpotensi memiliki lebih banyak konsekuensi yang dapat merugikan Korea Selatan bila dibandingkan dengan hanya sekedar untuk mendukung koeksistensi damai di antara kedua Korea saja.</p>
10	<p>Dilema Keamanan Korea Selatan dalam Menghadapi Nuklir Korea Utara dari Atiqah tahun 2017.</p>	<p>Teori <i>security dilemma</i> sebagai bagian dari teori politik internasional</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah meneliti tentang salah satu elemen terpenting yang ada pada dalam dilema keamanan. Dilema Keamanan sendiri adalah peningkatan kemampuan militer yang biasanya diimplementasikan dalam peningkatan anggaran militer dan keikutsertaan dalam konflik atau masalah internasional yang menonjolkan bidang militernya. Untuk itu Korea Selatan juga berupaya untuk mempertahankan dirinya dari serangan Korea Utara dan mengutamakan kepentingan nasionalnya, diatas kepentingan negara lain yang berdasarkan prinsip <i>self-help</i> (pertolongan terhadap diri sendiri). Dimana dalam menjaga dan meningkatkan keamanannya, suatu negara dapat mengupayakan langkah-langkah yang dapat</p>

			mengakibatkan berkurangnya keamanan di negara lain serta dapat mengganggu keamanannya.
--	--	--	--

1.5 Landasan Teori

Untuk menjelaskan fenomena yang terkait dengan judul ini, penulis menggunakan teori realisme defensif untuk menjabarkan strategi Korea Selatan untuk memperkuat keamanan nasionalnya dari ancaman Korea Utara.

Salah satu pendekatan utama dalam studi Hubungan Internasional yang tetap relevan hingga kini adalah realisme. Meskipun definisi paradigma realisme dapat bervariasi di antara para akademisi, secara umum pendekatan ini berlandaskan pada sejumlah asumsi dasar. Diantaranya, negara dipandang sebagai aktor utama dalam dinamika politik global, menjadi fokus utama dalam unit analisis, bertindak secara rasional dalam mengejar kepentingannya, serta menempatkan isu keamanan nasional sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negerinya.²³ Seiring berjalannya waktu, teori-teori baru terus bermunculan di ruang lingkup paradigma realisme, seperti teori neo-realisme, kemudian teori neo-realisme terbagi kembali menjadi dua yaitu *offensive realism* dan *defensive realism*.²⁴

Neo-realisme, atau realisme struktural, merupakan salah satu teori hubungan internasional yang menegaskan otonomi politik internasional dengan

²³Viotti, PR, & Kauppi, M (2010). *International Relations Theory, 5'Th Edition.*, London: Longman, hal.12.

²⁴Taliaferro, J. W. (2000). Security Seeking under Anarchy: Defensive Realism Revisited. *International Security*, 25(3), hal.132. <http://www.jstor.org/stable/2626708>

mendefinisikan struktur sistem internasional sebagai faktor utama yang menentukan perilaku negara. Dalam pengembangan teorinya, neo-realisme mempertahankan prinsip-prinsip utama realpolitik, yakni negara sebagai aktor rasional yang berupaya bertahan hidup dan menjaga keamanannya.²⁵ Neo-realisme berasumsi bahwa negara-negara mencapai kekuasaan dan mengutamakan keamanan bukan karena sifat manusia, melainkan karena struktur sistem internasional yang anarkis dan keinginan untuk bertahan hidup dalam sistem yang tidak memiliki otoritas sentral yang dapat menjamin keamanan yang mendorong mereka untuk bertindak demikian (*security dilemma*)²⁶.

Negara sebagai satu keutuhan merupakan aktor terpenting dalam Hubungan Internasional yang bersifat rasional dalam hal *survivability*, dan *power* sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara atau kepentingan negara yaitu kelangsungan hidup negara dengan usaha untuk mempertahankan keamanannya atau dikenal sebagai *security maximizer*.²⁷

Negara tidak perlu meningkatkan kekuatan mereka untuk mendominasi dunia. Menurut Waltz, negara-negara akan membentuk aliansi atau kerja sama militer untuk menahan kekuatan negara-negara besar dalam sistem internasional. Hal ini menghasilkan konsep keseimbangan kekuatan atau *balance of power*, karena negara-negara yang bersikap defensif cenderung menyeimbangkan

²⁵Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979), hal.117–118.

²⁶ Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Long Grove.

²⁷ Budhi Tri Suryanti, 2021 Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional, *Jurnal Diplomasi Pertahanan* Vol. 7 No. 1, hlm. 29-35. Diakses dalam: <http://139.255.245.7/index.php/DP/article/view/674> (20/7/2023)

kekuatan mereka dengan negara-negara agresor atau negara-negara yang cenderung dominan dalam persenjataan.²⁸

Neo-realisme, atau realisme struktural, merupakan salah satu teori hubungan internasional yang menegaskan otonomi politik internasional dengan mendefinisikan struktur sistem internasional sebagai faktor utama yang menentukan perilaku negara. Dalam pengembangan teorinya, neorealisme mempertahankan prinsip-prinsip utama *realpolitik*, yakni negara sebagai aktor rasional yang berupaya bertahan hidup dan menjaga keamanannya.²⁹ Neo-realisme berasumsi bahwa negara-negara mencari kekuasaan dan mengutamakan keamanan bukan karena sifat manusia, melainkan karena struktur sistem internasional yang anarkis dan keinginan untuk bertahan hidup dalam sistem yang tidak memiliki otoritas sentral yang dapat menjamin keamanan yang mendorong mereka untuk bertindak demikian (*security dilemma*)³⁰.

Dalam konteks Politik Internasional, ada perbedaan mendasar antara perilaku *bandwagoning* dan *balancing* yang sama menitikberatkan pada aliansi, kedua perilaku tersebut menjadi inti dari teori neo-realisme struktural Kenneth Waltz. Dalam konteks domestik, seperti dalam kompetensi kepemimpinan partai politik, perilaku *bandwagoning* dapat dianggap rasional karena pihak yang kalah tetap memiliki peluang untuk mendapatkan keuntungan atau pengaruh setelah pemenang ditentukan. Dalam kondisi seperti ini, keamanan bukanlah faktor yang

²⁸ Baylis, J, Smith, S, & Owens, P (2017). *The globalization of world politics: An introduction to international relations: Oxford University Press*, hal.105.

²⁹ Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979), hal.117–118.

³⁰ *Ibid.*

terancam, sehingga bergabung dengan pemenang menjadi strategi yang masuk akal.³¹ Namun, dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, logika yang sama tidak berlaku. Negara-negara tidak dapat mengandalkan pihak dominan untuk menjamin keamanan mereka. Dalam sistem seperti ini, keamanan adalah tujuan tertinggi, dan negara akan berusaha mempertahankan posisinya melalui penguatan kekuatan sendiri atau menjalin aliansi, bukan dengan bergabung ke pihak yang lebih kuat, melainkan membentuk koalisi penyeimbang (*balancing coalition*).³²

Waltz menegaskan bahwa dalam sistem internasional:

*"We do not expect the strong to combine with the strong in order to increase their extent of their power over others, but rather to square off and look for allies who might help them."*³³

Artinya, negara-negara besar tidak akan bergabung satu sama lain hanya untuk menambah kekuasaan, melainkan mencari sekutu untuk menyeimbangkan ancaman dari negara yang lebih dominan. Jika negara lebih tertarik memaksimalkan kekuasaan, maka mereka akan bergabung dengan pihak terkuat, dan dunia akan menyatu dalam satu hegemoni. Namun, hal ini tidak terjadi, karena sistem internasional secara struktural mendorong perilaku *balancing*, bukan *bandwagoning*.

Lebih jauh, Waltz menyatakan bahwa:

*"The first concern of states is not to maximize power but to maintain their positions in the system."*³⁴

³¹ Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Long Grove. Hal.126.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Dengan kata lain, kekuasaan hanyalah sarana, bukan tujuan akhir. Tujuan yang ingin dicapai negara dalam sistem internasional adalah keamanan dan kelangsungan eksistensial, bukan dominasi mutlak. *Balancing* dalam neo-realisme dapat dilakukan melalui dua cara yaitu *internal balancing* dengan meningkatkan kapabilitas militer dan pertahanan nasional secara mandiri dan *external balancing* yaitu aliansi atau kerja sama militer dengan negara lain.³⁵ Dalam logika realis, upaya *balancing* ini, khususnya ketika bersifat ofensif, seringkali berujung pada perlombaan senjata (*arms race*) sebagai manifestasi nyata dari persaingan untuk memperebutkan keunggulan.³⁶ Adapun konsep *balance of power* ini menuai kritik, khususnya mengenai relevansinya bagi negara-negara kecil (*small powers*). Stephen M. Walt, dalam pengembangan dan sekaligus kritik terhadap teori struktural Kenneth Waltz, berargumen bahwa kerangka *balance of power* terlalu menyederhanakan dan tidak cukup menjelaskan perilaku negara-negara yang sumber dayanya terbatas.³⁷ Persoalan mendasarnya adalah kapasitas, negara kecil seringkali tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk melakukan internal balancing melalui pembangunan militer yang signifikan, sekaligus tidak memiliki sesuatu yang bisa diunggulkan (*bargaining power*) yang memadai untuk membentuk aliansi setara (*external balancing*) dengan negara besar, karena tidak dapat menawarkan *relative gains* yang sepadan dalam kerja sama. Oleh karena itu,

³⁵Lihat tentang *internal* dan *external balancing* dalam Waltz, *Theory of International Politics*, hlm. 118; dan Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics*, hlm. 156-157.

³⁶Konsep bahwa persaingan keamanan sering berujung pada perlombaan senjata merupakan premis umum dalam teori realis. Lihat, misalnya, John J. Mearsheimer, *The Tragedy of Great Power Politics* (New York: W.W. Norton & Company, 2001), Hal. 37-40.

³⁷Stephen M. Walt, *The Origins of Alliances* (Ithaca: Cornell University Press, 1987). hal.5.

Walt menawarkan konsep *balance of threat* sebagai kerangka yang lebih akurat.³⁸ Menurutnya, yang memicu respons suatu negara bukan semata-mata kekuatan dari negara lain, tetapi tingkat ancaman (*threat*) yang dirasakan, yang merupakan gabungan dari kekuatan total, kedekatan geografis, kapabilitas ofensif, dan niat yang dirasakan.³⁹ Bagi negara kecil, logika ini lebih realistis karena mereka cenderung merespons aktor yang paling mengancam secara langsung, terlepas dari apakah aktor itu adalah kekuatan global terkuat atau bukan. Lebih lanjut, dalam situasi dimana ancaman datang dari kekuatan yang jauh lebih superior, pilihan strategis yang paling rasional bagi negara kecil seringkali bukan *balancing*, melainkan *bandwagoning*, yaitu berpihak pada sumber ancaman tersebut untuk mendapatkan perlindungan.⁴⁰ Dinamika ancaman dan respons tidak selalu berujung pada konflik terbuka atau perlombaan senjata skala penuh. Seringkali, yang muncul adalah strategi *deterrence* (pencegahan) dan *retaliation* (pembalasan). Teori pencegahan, yang masih berada dalam tradisi realis, berusaha menjelaskan bagaimana negara menggunakan ancaman pembalasan yang kredibel, seiring kali melalui pengembangan atau pameran senjata, untuk mencegah serangan dari lawan.⁴¹ Ketika *deterrence* gagal dan serangan terjadi, negara dapat memilih untuk membalas (*retaliate*). Pembalasan tidak harus selalu berskala besar atau mematikan, tentu dapat bersifat simbolis dan terbatas, yang tujuannya utamanya adalah *defensive*.⁴²

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*, hal.7.

⁴¹Patrick M. Morgan, *Deterrence Now* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). hal. 48.

⁴²*Ibid.*

Meskipun Korea Utara menyadari bahwa mengumumkan diri sebagai negara bersenjata nuklir secara terbuka dapat menimbulkan kerugian, mereka tetap percaya bahwa tindakan ini akan memberikan keuntungan simbolis dan teknologi yang penting untuk memperkuat kedaulatan dan kemakmuran negara. Dalam sebuah paragraf yang substansial, Mearsheimer menyatakan bahwa,

*“Nuclear weapons are a powerful force for peace because they are weapons of mass destruction. They create the possibility that in a war both sides will cease to exist as functioning societies.”*⁴³

Strategi tersebut menandakan bahwa senjata nuklir bukan hanya sebagai alat keamanan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan nasional dan sarana untuk mengejar kepentingan politik di tingkat internasional. Kelebihan yang dimiliki oleh Korea Utara adalah memiliki kekuatan nuklir (*nuclear deterrence*), dimana nuklir adalah puncaknya persenjataan.⁴⁴ Kepemilikan senjata nuklir oleh suatu negara dapat menjadi simbol bahwa negara tersebut memiliki kekuatan dalam bidang pertahanan negara, sekaligus ancaman yang besar bagi negara lain. Bagi Korea Utara, senjata nuklir adalah sebagai *warning system*, bahwa Korea Utara bersifat *deterrence* (menakut-nakuti dan menggertak). Seperti pendapat Kenneth Waltz, bahwa senjata nuklir menciptakan mekanisme *deterrence* yang sangat efektif. Karena negara-negara yang memiliki senjata nuklir hanya perlu menunjukkan keberanian yang minim untuk merespons dengan serangan balasan, atau *second*

⁴³ Mearsheimer, J. J. (1993). The Case for a Ukrainian Nuclear Deterrent. In *Source: Foreign Affairs* (Vol. 72, Issue 3), p.57. <http://www.jstor.org/stable/20045622>

⁴⁴ Tomonaga, M. (2019). *The Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki: A Summary of the Human Consequences, 1945- 2018, and Lessons for Homo sapiens to End the Nuclear Weapon Age*. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 2(2),

strike, guna menciptakan rasa takut pada negara-negara musuh dan mencegah serangan yang mungkin terjadi.⁴⁵

Disamping itu, perekonomian Korea Utara yang terus menurun dari mulai tahun 1990-an. Sehingga, kepemilikan senjata nuklir dapat menjadi alat untuk mencapai kesepakatan dengan cepat meskipun penuh dengan resiko. Argumen tersebut diutarakan oleh seorang pakar pertahanan Korea Selatan yaitu Young Sun Song yang melihat bahwa, ‘melalui adanya senjata nuklir, Korea Utara akan lebih mudah untuk melakukan tawar-menawar dan berdialog secara cepat dengan Korea Selatan atau negara-negara Barat’.⁴⁶ Senjata nuklir tersebut kemudian digunakan oleh Korea Utara sebagai sarana strategis bagi negaranya ketika sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Korea Utara yang mengalami pelemahan ekonomi akibat sanksi yang diberikan oleh negara-negara Barat, ditambah dengan isolasi diri selama bertahun-tahun, tetapi bermodalkan senjata nuklir, membuat mereka cenderung menggunakan senjata nuklir untuk mendapatkan apa yang diinginkan⁴⁷. Pada intinya, ketakutan Korea Utara akan ketidakamanan militer dan kegagalan ekonomi telah mendorongnya untuk menjadikan senjata nuklir dan rudal sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi negara.⁴⁸ Tindakan ofensif maupun defensif, baik oleh negara besar maupun kecil, dapat dianalisis melalui lensa logika

⁴⁵ Waltz, K. (1990). *Nuclear Myths and Political Realities*. The American Political Science Review, 84(3), 731–745.

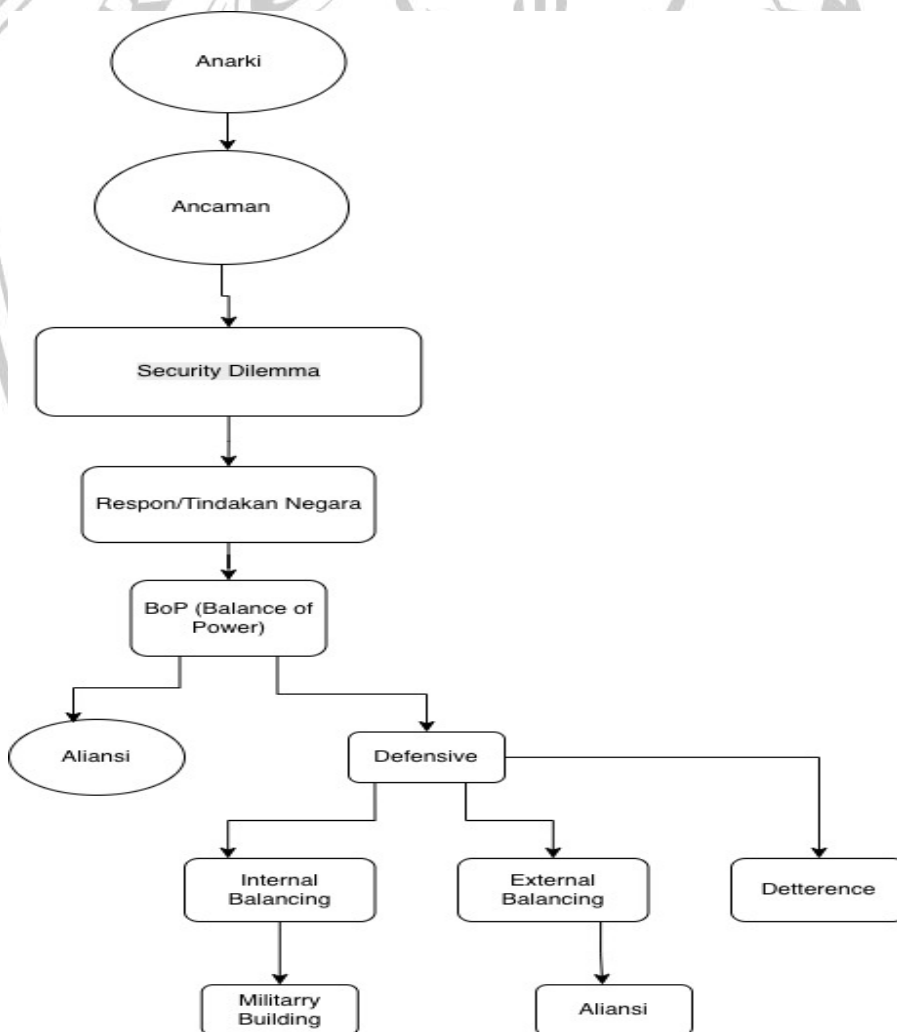
⁴⁶ Song, Y. S. (1991). North Korea’s Nuclear Issue. *Journal of Northeast Asian Studies*, 10(3), 61–81, dalam Setiawan, T., Sukmaniara, M., Komboy, J., & Mulyaman, D. (2021). PENGAYAAN SENJATA NUKLIR SEBAGAI MODAL EKONOMI KOREA UTARA. *Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(02), 212 - 231. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v6i2.640>

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Park, K.-A. (2000). North Korea’s Defensive Power and U.S.-North Korea Relations. *Pacific Affairs*, 73(4), p.544. <https://doi.org/10.2307/2672443>

realis yang berakar pada kondisi anarki internasional. Pilihan strategis suatu negara, *balancing* (dengan *power* atau *threat*), *bandwagoning*, *deterrence*, atau *retaliation*, serta konsekuensinya seperti perlombaan senjata, tergantung pada penilaiannya terhadap ancaman, kapasitas relatifnya, dan tujuan akhirnya (mempertahankan diri dan kedaulatan dalam lingkungan yang tidak aman). Narasi ini menunjukkan bahwa meskipun fokusnya dapat pada strategi defensif tertentu, kerangka pemikiran realis yang lebih luas tetap berlaku untuk menjelaskan perilaku negara dalam sistem internasional.

Bagan 1.1 Landasan Teori Realisme Defensif



Sifat alamiah dari negara adalah salah satu nya kewibawaan. Menurut Waltz, negara harus meningkatkan keamanan negara nya. Mengutip dari pendapat salah satu ahli, Waltz menulis, "struktur sistem internasional yang anarkis mendorong negara untuk mempertahankan kebijakan moderat dan isolasionis demi menciptakan keamanan." Upaya Korea Selatan dalam meningkatkan keamanan negara nya adalah sebagai bentuk meningkatkan keamanan negara nya atas Korea Utara.⁴⁹

Lantas, penulis memandang bahwa perspektif realis defensif mampu menjawab sebuah alasan mengapa Korea Selatan menggunakan sikap realis defensif nya untuk mengatasi ancaman uji coba nuklir Korea Utara.

Respon defensif dari Korea Selatan pun bukan tanpa alasan, contohnya pada perubahan signifikan dalam strategi militer dan kebijakan nuklir Korea Utara yang dapat dikonfirmasi melalui berbagai provokasi dan ancaman yang terjadi sepanjang tahun 2022. Alasan Korea Selatan melakukan pendekatan realis defensif karena bertujuan untuk membangun pertahanan ketika sudah mampu mengidentifikasi dengan jelas siapa musuhnya. Namun, Korea Selatan tidak bertindak ofensif karena Korea Selatan hanya ingin mempertahankan keamanan negara nya tanpa harus menyerang terlebih dulu. Adapun karena pasca sanksi THAAD Tiongkok, membuat ketegangan berlanjut di kawasan Asia Timur. Sehingga, *Three Axis Defense System* merupakan strategi dari Korea Selatan

⁴⁹ Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. McGraw-Hill. hal.131

untuk menahan tindakan Korea Utara yang bersifat mengancam Korea Selatan. Maksimalisasi kekuatan dari Korea Selatan untuk mengeluarkan daya gentar sehingga lebih mampu menahan tindakan anarki korut yang bersifat memunculkan nuklir. Pemerintahan Yoon Suk-yeol menegaskan pentingnya "aliansi dalam aksi" bersama Amerika Serikat dan Jepang sebagai respons atas peningkatan ancaman dari Korea Utara.⁵⁰

Berdasarkan logika ini, revitalisasi *Three Axis Defense System* (TADS) oleh Korea Selatan merupakan perwujudan nyata dari upaya *balance of power* bersifat *kompromistis ke Tiongkok* dan *deterrence* untuk Korea Utara. Ini adalah upaya penguatan militer mandiri yang komprehensif (*Kill Chain*, KAMD, KMPR) untuk mendeteksi, mencegah, membalas, serta langkah preventif untuk mencegah potensi serangan dari Korea Utara. Dengan demikian, revitalisasi TADS di bawah pemerintahan Yoon Suk Yeol dapat dibaca sebagai tindakan realisme defensif yang rasional. Tindakan ini merupakan bentuk *internal balancing* dalam merespons *security dilemma* yang diciptakan oleh provokasi nuklir Korea Utara, yang kemudian diperkuat dengan *external balancing* dengan ber aliansi ke Amerika Serikat. Dengan kata lain juga, Presiden Yoon Suk Yeol secara sadar memilih untuk tidak mengandalkan sepenuhnya pada sistem seperti THAAD di era presiden sebelumnya yang ternyata terbukti memicu ketegangan diplomatik dengan Tiongkok di regional. Keseluruhan strategi ini ditujukan untuk menjamin keamanan nasional, kewibawaan, dan kedaulatan Korea Selatan, tanpa memiliki tujuan ofensif untuk mendominasi atau memulai konflik.

⁵⁰*Ibid.*

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan apa yang diteliti di kajian ilmiah ini, peneliti mengungkapkan bahwa penelitian ini bersifat eksplanatif. Penelitian Eksplanatif sendiri adalah penelitian yang memaparkan mengenai interaksi antara dua atau lebih variabel yang diteliti.⁵¹ Seperti pada penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan tentang strategi yang diberikan oleh Korea Selatan terhadap ancaman uji coba nuklir Korea Utara, yang mana menggunakan teori dan aspek-aspek untuk mendukung suatu argumen dari teori yang ada pada penelitian ini.

1.6.2 Variabel Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini ada pada level negara yaitu Korea Selatan, khususnya perilakunya dalam melakukan revitalisasi *Three Axis Defense System*. Sementara itu, unit eksplanasi adalah negara Korea Utara melalui peningkatan ancaman nuklirnya, yang ditunjukkan melalui perkembangan kapabilitas senjata nuklir dan intensitas uji coba rudal balistik. Dengan demikian, tingkat analisis atau level analisis penelitian ini berada pada level korelasionis, dimana perilaku suatu negara dipengaruhi oleh tindakan negara lain. Dalam konteks ini, peningkatan ancaman nuklir Korea Utara mendorong Korea Selatan untuk merespon ancaman nuklir Korea Utara dengan memperkuat mekanisme pertahanannya melalui revitalisasi *Three Axis Defense System*.

⁵¹ Prof.DR. Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013).

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian

1.6.3.1 Batasan Waktu

Batasan waktu penelitian ini adalah dari masa pemerintahan pemimpin Korea Selatan yang menerapkan sikap defensif nya terhadap ancaman dari Korea Utara, sehingga batasan waktu tersebut dimulai dari masa pemerintahan Kim Dae jung, Roh Moo-Hyun, Lee Myung Bak, serta yang terakhir yaitu presiden Yoon Suk Yeol di tahun 2022.

1.6.3.2 Batasan Materi

Adapun batasan materi dari penelitian ini adalah bagaimana tanggapan serta respon Korea Selatan dengan menggunakan strategi penguatan keamanan negara dalam mengatasi ancaman Korea Utara serta ancaman-ancaman yang ditunjukkan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan.

1.6.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dan alat pengumpulan data yaitu teknik *library research* dan literatur, teknik ini mencoba untuk mencari dan mengumpulkan sumber data dari *library research* yang diperoleh, kemudian alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah informasi yang berasal dari buku, jurnal-jurnal internasional, skripsi, surat kabar, dan media elektronik lain seperti internet. Data-data ini kemudian akan diolah dan disusun oleh penulis ke dalam beberapa bab pembahasan sesuai dengan sistematika dan konsep penulisan karya ilmiah untuk mendapat hasil penelitian yang diinginkan.

1.7 Hipotesa

Terkait dengan penjelasan diatas berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang tercantum, terdapat hipotesa yang ditulis untuk menjawab dan memecahkan studi kasus ini. Fenomena mengenai respon defensif Korea Selatan terhadap Korea Utara dimulai dengan pihak Korea Utara mencanangkan kebijakan baru nya terhadap konflik dengan Korea Selatan yaitu *North Korean Misille Test* yang mana ancaman tersebut adalah sebuah ancaman yang nyata dan masif bagi Korea Selatan. Lantas, hal tersebut menjadi menarik karena dalam menanggapi ancaman nuklir oleh Korea Utara, Korea Selatan pada masa Pemerintahan Yoon Suk Yeol tahun 2022 mencoba untuk merespon menggunakan taktik *realism defensive*.

Sehingga, peneliti memiliki argumen dasar terhadap sikap realis defensif Korea Selatan. Bahwa, berdasarkan latar belakang masalah di atas yaitu respon Korea Selatan merevitalisasi *Three Axis Defense System (TADS)* adalah sebagai respon mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional nya ketika merasa terancam oleh uji coba nuklir Korea Utara yang semakin meningkat.

Revitalisasi TADS juga merupakan strategi bertahan yang disederhanakan dan bersifat kompromistis dari versi sebelumnya yaitu THAAD yang sempat menimbulkan ketegangan di kawasan karena dianggap oleh China sebagai sistem keamanan yang terkesan agresif dan mengancam⁵². Pasca sanksi ekonomi China karena THAAD di tahun 2016, Korea Selatan tetap berusaha untuk memastikan

⁵² Tri, M., Putra, A. G., Perintis, J., Km, K., Indah, T., Tamalanrea, K., Makassar, K., & Selatan, S. (2025). *Strategi Pertahanan Korea Selatan terhadap Ancaman Korea Utara: Studi Kasus Pengembangan Sistem THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)*. 271–279. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.1107>

keamanan nasionalnya dan menunjukkan kedaulatan negaranya melalui strategi bertahan (*defensive*) dan menghindari kesan menyerang (*offensive*) namun tetap bertujuan untuk menyeimbangkan diri (*balancing*) dengan China dengan membuat *defense system* yang tidak provokatif.

1.8 Struktur Penulisan

Di dalam sub bab ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan bagian-bagian yang ada di kajian ilmiah ini. Sehingga didapat struktur penulisan yang terbagi menjadi empat bab, yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2 Struktur Penulisan

BAB	ISI
BAB 1	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Teori dan Konsep 1.6 Metode Penelitian 1.7 Hipotesa / Argumen Pokok 1.8 Struktur Penulisan
BAB 2	Ancaman Uji Coba Nuklir Korea Utara dalam Perspektif Korea Selatan 2.1 Pasang Surut Ketegangan Korea Selatan dan Korea Utara 2.2 Posisi Tiongkok Terhadap Korea Utara dalam Perspektif Korea Selatan 2.3 Respon Korea Selatan terhadap Ancaman Nuklir Korea Utara 2.3.1 Era Pemerintahan Kim Dae Jung 2.3.2 Era Pemerintahan Roo Moo Hyun 2.3.3 Era Pemerintahan Lee Myung Bak 2.3.4 Era Pemerintahan Yoon Suk Yeol

BAB 3	Strategi Bertahan Korea Selatan Menghadapi Ancaman Uji Coba Nuklir Korea Utara Pasca Sanksi THAAD oleh China 3.1 Kebijakan Defensifitas Korea Selatan melalui Revitalisasi <i>Three Axis Defense System</i> 3.2 Revitalisasi Kebijakan “ <i>Korean Three Axis Defense System</i> ” tahun 2022 dalam Peningkatan Strategi Pertahanan Korea Selatan 3.2.1 <i>Three Axis Defense System</i> Korea Selatan 2016 3.2.2 <i>Three Axis Defense System</i> Korea Selatan 2022 3.2.3 Perbedaan Mekanisme Respon TADS 2016 dan TADS 2022 Terhadap Rudal Balistik 3.2.4 Aliansi ROK-US 3.3 TADS sebagai Strategi Asertif Terhadap Korea Utara (Ancaman Jarak Dekat) 3.4 <i>Three Axis Defense System</i> sebagai Sistem Pertahanan Kompromistis terhadap Tiongkok (Ancaman Jarak Jauh)
BAB 4	PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran